

Analisis derajat desentralisasi dan kemandirian PAD serta hubungannya dengan produktivitas belanja daerah di Kota Jambi

Viozana Demora

Mahasiswa Prodi Ekonomi Pembangunan Fak. Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi

Abstrak.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis (1) derajat desentralisasi fiskal di Kota Jambi, (2) derajat kemandirian fiskal di Kota Jambi, (3) produktivitas belanja daerah di Kota Jambi, (4) tingkat keeratan hubungan antara derajat desentralisasi dan kemandirian fiskal dengan produktivitas belanja daerah di Kota Jambi. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa runtun waktu (time series) dari Tahun 2001-2013 mencakup (1) realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Jambi, (2) realisasi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Jambi. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu analisis Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF), analisis Derajat Kemandirian Fiskal (DKF), analisis Produktivitas Belanja Daerah (PBD), serta analisis Korelasi Pearson. Hasil analisis menunjukkan bahwa derajat desentralisasi fiskal, kemandirian fiskal dan produktivitas belanja daerah di Kota Jambi masih terkategori lemah. Selanjutnya terdapat korelasi positif yang nyata antara derajat desentralisasi dan kemandirian fiskal dengan produktivitas belanja daerah di Kota Jambi.

Kata kunci: desentralisasi fiskal, kemandirian fiskal, belanja daerah

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi (*economic development*) diartikan sebagai suatu proses perubahan terus-menerus menuju ke arah perbaikan di bidang ekonomi, yaitu mencakup pertumbuhan ekonomi yang diikuti oleh perubahan-perubahan dalam struktur dan corak kegiatan ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks daerah, pembangunan ekonomi merupakan hal yang menjadi perhatian lebih karena mendukung pencapaian tujuan atau mendorong perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik melalui proses pengelolaan sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru, serta merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut.

Kota Jambi sebagai ibukota Provinsi Jambi mengalami peningkatan realisasi pendapatan daerah sejak pelaksanaan desentralisasi fiskal. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Jambi pada periode 2001-2013 mengalami peningkatan. Pada tahun 2001 realisasi PAD yang diperoleh di Kota Jambi sebesar Rp. 17,22 milyar lebih dan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya hingga mencapai Rp. 113,09 milyar lebih pada tahun 2013, dengan rata-rata peningkatan sebesar 15,38 % pertahunnya. Sedangkan Total realisasi pendapatan daerah pada periode 2001-2013 juga mengalami peningkatan secara berkala. Pada tahun 2001, Total realisasi pendapatan daerah yang diperoleh Kota Jambi yaitu sebesar Rp. 198,877 milyar dan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya hingga sebesar Rp. 1,018 triliun lebih pada tahun 2013, atau meningkat rata-rata sebesar 15,38 % pertahunnya. Realisasi nilai dari total belanja

daerah juga mengalami peningkatan pertahunnya. Pada tahun 2001 total belanja daerah sebesar Rp. 135,72 milyar lebih dan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya hingga mencapai Rp. 938,71 milyar pada tahun 2013, atau meningkat sebesar 3,91 %. (BPS Kota Jambi, 2013)

Dengan laju pertumbuhan ekonomi yang sangat bervariasi antar daerah pelaksanaan desentralisasi fiskal pun disinyalir ikut bervariasi, bagaimanapun bervariasi tetaplah berorientasi pada percepatan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Berdasarkan hal tersebut, maka dirumuskan tujuan penelitian sebagai berikut: 1) Untuk menganalisis tingkat derajat desentralisasi fiskal di Kota Jambi; 2) Untuk menganalisis tingkat derajat kemandirian fiskal di Kota Jambi; 3) Untuk menganalisis tingkat produktivitas belanja daerah di Kota Jambi; 4) Untuk menganalisis hubungan antara derajat desentralisasi dan kemandirian fiskal dengan produktivitas belanja daerah di Kota Jambi.

TINJAUAN PUSTAKA

Desentralisasi fiskal

Dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, desentralisasi diartikan sebagai penyerahan wewenang pemerintah, oleh pemerintah (pusat) kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desentralisasi fiskal adalah pendelegasian tanggung jawab dan pembagian kekuasaan dan kewenangan untuk pengambilan keputusan di bidang fiskal yang meliputi aspek penerimaan (*tax assignment*) maupun aspek pengeluaran (*expenditure assignment*). Saragih (2003) secara singkat mengartikannya sebagai suatu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah, untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintahan dan pelayanan publik sesuai dengan banyaknya kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan. Jadi secara umum, definisi desentralisasi fiskal sebagai suatu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah, untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintahan dan pelayanan publik sesuai dengan banyaknya kewenangan pemerintah yang dilimpahkan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Pengertian APBD adalah suatu rancangan keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Seperti halnya dengan APBN, rencana APBD diajukan setiap tahun oleh pemerintah daerah kepada DPRD untuk dibahas dan kemudian disahkan sebagai peraturan daerah. Yang termasuk keuangan daerah yang dikelola langsung adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan barang-barang inventaris milik daerah. Di lain pihak, keuangan daerah yang dipisahkan meliputi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Keuangan daerah dapat diartikan sebagai hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki atau dikuasai oleh negara.

Anggaran pendapatan

Menurut pernyataan standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 23 mendefinisikan, Pendapatan adalah arus masuk dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal selama suatu periode. Sedangkan, Pendapatan daerah adalah semua penerimaan daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi hak daerah.

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah. Menurut UU No. 25 Tahun 1999 jo UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah, maka sumber penerimaan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan (Nurcholis, 2005).

Anggaran belanja

Istilah belanja pada umumnya hanya digunakan di sektor publik, tidak di sektor bisnis. Belanja di sektor publik terkait dengan penganggaran, yaitu menunjukkan jumlah uang yang telah dikeluarkan selama satu tahun anggaran. Sedangkan, belanja daerah adalah semua pengeluaran daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban daerah. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Daerah.

METODE

Jenis dan sumber data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang mencakup 1) realisasi penerimaan APBD Kota Jambi pada periode tahun 2001-2013; 2) PDRB Kota Jambi pada periode tahun 2001-2013. Sumber data utama adalah Kantor DPKAD Kota Jambi dan Badan Pusat Statistik Kota Jambi.

Alat analisis

Untuk mengukur derajat desentralisasi fiskal digunakan rumus berikut:

$$DD_t = \frac{PAD_t}{TPD_t} \times 100\%$$

Dimana :

DD_t = Nilai Derajat Desentralisasi fiskal pada tahun t

PAD_t = Nilai realisasi PAD pada tahun t

TPD_t = Nilai realisasi total penerimaan daerah tahun t

Untuk mengukur derajat kemandirian fiskal digunakan rumus berikut:

$$DKF_t = \frac{PAD_t}{Transfer_t + Pinjaman_t} \times 100\% = \frac{PAD_t}{DP_t} \times 100\%$$

Dimana :

DKF_t = Nilai derajat kemandirian fiskal tahun t

PAD_t = Nilai realisasi PAD pada tahun t

DP_t = Nilai realisasi dana perimbangan tahun t

Untuk mengukur produktivitas belanja daerah digunakan rumus berikut:

$$PBD_t = \frac{TBD_t}{PDRB_t} \times 100\%$$

Dimana :

PBD_t = Nilai produktivitas belanja daerah terhadap PDRB pada tahun t

TBD_t = Nilai realisasi total belanja daerah tahun t

$PDRB_t$ = Nilai produk domestik regional bruto pada tahun t

Untuk menganalisis hubungan antara derajat desentralisasi dan kemandirian fiskal dengan produktivitas belanja daerah di digunakan alat analisis korelasi pearson. Rumus yang dipergunakan (Dajan, 1995) sebagai berikut :

$$r = \frac{n\sum xy - (\sum x) - (\sum y)}{\sqrt{\{n\sum x^2 - (\sum x)^2\}\{n\sum y^2 - (\sum y)^2\}}}$$

Dimana :

n = Banyaknya Pasangan data X (Derajat Desentralisasi fiskal dan kemandirian fiskal) dan data Y (Produktivitas belanja daerah)

x = Total Jumlah dari Variabel X (Derajat desentralisasi fiskal dan kemandirian fiskal)

y = Total dari Variabel Y (Produktivitas belanja daerah)

x^2 = Kuadrat Total Jumlah Variabel X (Derajat desentralisasi fiskal dan kemandirian fiskal)

y^2 = Kuadrat Total Jumlah Variabel Y (Produktivitas belanja daerah)

xy = Hasil Perkalian dari Total Jumlah Variabel X (Derajat desentralisasi fiskal dan kemandirian fiskal) dan Variabel Y (Produktivitas belanja daerah)

Operasional variabel

1. Derajat desentralisasi fiskal adalah nilai dari perbandingan antara nilai realisasi pendapatan asli daerah dengan nilai realisasi total penerimaan daerah yang diukur dalam satuan persentase.
2. Derajat kemandirian fiskal adalah nilai dari perbandingan antara nilai realisasi pendapatan asli daerah dengan nilai realisasi dana perimbangan yang diukur dalam satuan persentase.
3. Produktivitas belanja daerah adalah jumlah nilai dari perbandingan antara nilai realisasi total belanja daerah dengan nilai produk domestik regional bruto yang diukur dalam satuan persentase.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis derajat desentralisasi fiskal di Kota Jambi

Derajat desentralisasi fiskal adalah ukuran kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam membiayai belanja daerah, berdasarkan ukuran tersebut dapat diketahui besaran kemampuan penghimpunan dana yang berasal dari daerah itu sendiri. Selanjutnya ukuran ini dinyatakan sebagai Rasio Derajat Desentralisasi fiskal. Hasil perhitungan rasio tersebut sebagaimana tersaji pada tabel 1.

Berdasarkan Tabel 1 terlihat bahwa selama periode Tahun 2001 – 2013, rasio derajat desentralisasi fiskal di Kota Jambi terkategori sangat rendah dan rendah, dengan posisi sangat lemah dan lemah. Rata-rata rasio derajat desentralisasi fiskal selama periode tersebut adalah 10,62

Tabel 1 Rasio desentralisasi fiskal Kota Jambi periode 2001-2013

Tahun	PAD	TPD	DDF= (PAD/TPD)	Rasio	Posisi
2001	15.091,87	185.551,65	8,13	Sangat Rendah	Sangat Lemah
2002	18.796,32	203.129,73	9,25	Sangat Rendah	Sangat Lemah
2003	23.414,79	233.438,79	10,03	Rendah	Lemah
2004	32.096,30	300.996,87	10,66	Rendah	Lemah
2005	38.124,98	336.847,60	11,31	Rendah	Lemah
2006	43.323,14	468.691,01	9,24	Sangat Rendah	Sangat Lemah
2007	45.524,69	552.407,69	8,24	Sangat Rendah	Sangat Lemah
2008	54.086,87	563.974,87	9,59	Sangat Rendah	Sangat Lemah
2009	55.671,55	604.024,55	9,21	Sangat Rendah	Sangat Lemah
2010	70.842,02	643.249,02	11,01	Rendah	Lemah
2011	98.999,48	708.001,48	13,98	Rendah	Lemah
2012	113.090,12	921.640,12	12,27	Rendah	Lemah
2013	149.041,21	980.907,01	15,19	Rendah	Lemah
Rata-rata	58.315,64	515.604,65	10,62	Rendah	Lemah

Sumber: Kantor DPKAD Kota Jambi (data diolah)

Derajat kemandirian fiskal Kota Jambi

Untuk mengetahui besaran derajat kemandirian fiskal di Kota Jambi dilakukan dengan cara membandingkan nilai realisasi pendapatan asli daerah (PAD) terhadap dana perimbangan (DP). Tabel 2 memperlihatkan rasio Derajat Kemandirian Fiskal di Kota Jambi selama periode 2001-2013.

Tabel 2 Rasio derajat kemandirian fiskal Kota Jambi selama periode 2001-2013

Tahun	PAD	DP	DKF= (PAD/DP)	Rasio	Posisi
2001	15.091,87	165.670,00	9,10	Sangat Rendah	Sangat Lemah
2002	18.796,32	178.602,44	10,52	Rendah	Lemah
2003	23.414,79	210.024,00	11,14	Rendah	Lemah
2004	32.096,30	254.879,07	12,59	Rendah	Lemah
2005	38.124,98	292.740,27	13,02	Rendah	Lemah
2006	43.323,14	422.075,87	10,26	Rendah	Lemah
2007	45.524,69	455.407,00	9,99	Sangat Rendah	Sangat Lemah
2008	54.086,87	503.237,00	10,74	Rendah	Lemah
2009	55.671,55	501.408,00	11,10	Sangat Rendah	Sangat Lemah
2010	70.842,02	535.586,00	13,22	Sangat Rendah	Sangat Lemah
2011	98.999,48	603.816,00	16,39	Rendah	Lemah
2012	113.090,12	741.677,00	15,24	Rendah	Lemah
2013	149.041,21	821.633,00	18,13	Rendah	Lemah
Rata-Rata	58.315,64	437.442,75	12,18	Rendah	Lemah

Sumber: Kantor DPKAD Kota Jambi (data diolah)

Berdasarkan Tabel 2 terlihat bahwa selama periode Tahun 2001 – 2013, rasio derajat kemandirian fiskal di Kota Jambi terkategori sangat rendah dan rendah, dengan posisi sangat lemah dan lemah. Rata-rata rasio derajat kemandirian fiskal selama periode tersebut adalah 12,18

Analisis produktivitas belanja daerah di Kota Jambi

Untuk mengetahui produktivitas belanja daerah di Kota Jambi dilakukan dengan cara membandingkan total belanja daerah terhadap PDRB. Tabel 3 memperlihatkan produktivitas belanja daerah di Kota Jambi selama periode 2001-2013.

Tabel 3 Rasio produktivitas belanja daerah Kota Jambi selama periode 2001-2013

Tahun	TBD	PDRB	PDB= (TBD/PDRB)	Rasio	Posisi
2001	147.647,59	2.074.956,77	7,11	Sangat Rendah	Sangat Lemah
2002	323.252,66	2.151.398,97	15,02	Rendah	Lemah
2003	254.096,36	2.255.715,03	15,69	Rendah	Lemah
2004	259.128,56	2.372.072,34	10,92	Rendah	Lemah
2005	332.050,00	2.506.910,31	13,24	Rendah	Lemah
2006	588.603,53	2.655.444,96	22,16	Sedang	Cukup Baik
2007	499.964,25	2.845.549,62	17,57	Rendah	Lemah
2008	620.507,00	3.020.126,51	20,54	Sedang	Cukup Baik
2009	651.315,00	3.215.319,40	20,25	Sedang	Cukup Baik
2010	673.011,53	3.429.619,04	19,62	Rendah	Lemah
2011	755.194,42	3.668.601,41	20,58	Sedang	Cukup Baik
2012	902.005,00	3.927.352,93	22,96	Sedang	Cukup Baik
2013	1.409.104,00	4.232.247,70	33,29	Cukup Tinggi	Sudah Baik
Rata-rata	576.144,60	2.950.408,30	18,38	Rendah	Lemah

Sumber: Kantor DPKAD Kota Jambi (data diolah)

Berdasarkan Tabel 3 terlihat bahwa selama periode Tahun 2001 – 2013, produktivitas belanja daerah di Kota Jambi terkategori sangat rendah, dan cukup tinggi, dengan posisi pada kisaran lemah, cukup baik dan sudah baik. Meskipun demikian, secara rata-rata produktivitas belanja daerah sebesar 18,38 dapat diartikan terkategori kurang.

Hubungan derajat desentralisasi dan kemandirian fiskal terhadap produktivitas belanja daerah di Kota Jambi

Untuk melihat hubungan antara Derajat Desentralisasi dan Kemandirian Fiskal terhadap Produktivitas Belanja Daerah di Kota Jambi digunakan rumus korelasi pearson. Korelasi pearson dapat memperlihatkan ada tidaknya hubungan atau keterikatan antar beberapa variabel yang diukur. Dalam penelitian ini variabel yang digunakan dalam perhitungan korelasi yang dimaksud adalah Derajat Desentralisasi Fiskal, Kemandirian Fiskal dan Produktifitas Belanja Daerah.

Korelasi pearson/nilai (r) antara variabel derajat desentralisasi terhadap produktivitas belanja daerah bernilai 0,640, dengan nilai signifikan pada (2-tailed) $0,018 < 0,05$. Ini menunjukkan hubungan/ korelasi antara derajat desentralisasi terhadap produktivitas belanja daerah mempunyai hubungan/ korelasi kuat dan nyata, dengan pola hubungan yang positif. Positif berarti menunjukkan hubungan searah dalam artian kenaikan derajat desentralisasi pada saat bersamaan juga terjadi kenaikan pada produktivitas belanja daerah dan sebaliknya.

Korelasi pearson/nilai (r) antara variabel kemandirian fiskal terhadap produktivitas belanja daerah bernilai 0,657, dengan nilai signifikan pada (2-tailed) $0,015 < 0,05$. Menunjukkan hubungan/ korelasi antara kemandirian fiskal terhadap produktivitas belanja daerah mempunyai hubungan/ korelasi tetap kuat dan nyata, dengan hubungan yang positif. Positif berarti menunjukkan hubungan searah dalam

artian kenaikan kemandirian fiskal pada saat bersamaan juga terjadi kenaikan pada produktivitas belanja daerah dan sebaliknya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Rata-rata Derajat Desentralisasi Fiskal daerah terhadap sebesar 10,62 persen (Rendah). Rata-rata rasio Derajat Kemandirian Fiskal sebesar 12,18 persen (Rendah). Dan juga rata-rata rasio Produktivitas Belanja Daerah sebesar 18,38 persen (Rendah).
2. Dari hasil analisis terlihat bahwa terdapat hubungan antara derajat desentralisasi dan kemandirian fiskal dengan produktivitas belanja daerah di Kota Jambi periode tahun 2001-2013, mempunyai hubungan/korelasi tetap kuat dan nyata, dengan pola hubungan yang positif. Positif berarti menunjukkan hubungan searah dalam artian kenaikan derajat desentralisasi dan kemandirian fiskal pada saat bersamaan juga terjadi kenaikan pada produktivitas belanja daerah dan sebaliknya

Saran-Saran

1. Pemerintah Kota Jambi diharapkan agar lebih serius dalam mengoptimalkan PAD yang dihimpun dari sektor pajak dan retribusi daerah dan lebih serius lagi dalam mengawasi pengelolaan keuangan daerah dengan penatausahaan yang tertib serta meningkatkan kerjasama dengan pihak terkait.
2. Pemerintah Kota Jambi juga diharapkan agar melakukan audit atas pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dan pelaksanaan program kegiatan guna mendorong transparansi dan akuntabilitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Ekonomi, 2013. *Hubungan PDRB terhadap belanja daerah*.
- Arsyad, 1999. *Ekonomi Pembangunan. Badan Pusat Statistik. 2013. PDRB Propinsi Jambi Menurut Kabupaten/Kota*.
- Badan Pusat Statistik Propinsi Jambi (2001-2013). *Kota Jambi _____ Jambi Dalam Angka. Berbagai tahun*
- Boediono, 2002. *Kebijakan Pengelolaan Negara dalam Rangka Pelaksanaan Azaz Desentralisasi Fiskal*, bahan pidato disajikan pada rapat koordinasi di Jakarta, 11 Februari 2002. Breusch, T. S. dan Pagan
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2007. *Sistem Informasi Keuangan Daerah*, [http:// www.sikd.djark.go.id](http://www.sikd.djark.go.id). Di akses pada tanggal 16 Januari 2015. Jam 20.45 WIB.
- Ekonomiku. "Pengertian hukum tujuan fungsi penyusunan APBD".
- Frameit, 2011. "Teori Keuangan Daerah Dan Pembangunan Daerah".
- Hariyadi, J., 2004. *Estimasi Penerimaan dan Belanja Daerah serta Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Belitung: Studi Kasus Tahun Anggaran 2001*.
- Junaidi, J; Zulgani, Z. (2011). Peranan Sumberdaya Ekonomi dalam Pembangunan Ekonomi Daerah. *Jurnal Pembangunan Daerah*, Edisi 3, 27-33
- Kifliansyah, 2004. *Analisa Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah*.
- Mardiasmo, 1999. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Andi, Yogyakarta.

- Nurcholis,H,2007.*Teori Dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. PT.Grasindo, Jakarta.
- Hariyadi,2005.“*Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi*”.
- Wibowo.P, 2008. “*Mencermati Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah*”.
- Rasyid, M. Ryaas. 2005. *Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Editor: Syamsudin Haris. Lembaga Pengetahuan Indonesia. Jakarta.
- Royan, 2013. “Makalah Kinerja Keuangan Negara”
- Susanto.1999. *Analisis Perkembangan Pembiayaan Fiskal Pemerintah Pusat dan Daerah (studi kasus Daerah Tingkat II Banjarnegara)*.